

LAMPIRAN 1.1

Pedoman Wawancara kepada Kepala Desa Pekalongan

1. Nama : -
Agama : -
Jenis Kelamin : -
Jabatan : -

1. Dalam melakukan penyusunan anggaran Desa Pekalongan apakah ada aturan atau undang-undang yang disetujui atau diterapkan?
2. Dalam melakukan penyusunan anggaran Desa Pekalongan apakah ada aturan atau undang-undang yang disetujui atau diterapkan?
3. Bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekalongan?
4. Siapa saja yang berperan dalam penyusunan APBDesa Pekalongan?
5. Keterlibatan masyarakat dalam menyusun APBDesa itu apa?
6. Program kerja itu sumbernya darimana?
7. Program kerja yang bagaimana yang disetujui atau diprioritaskan?
8. siapa yang menetapkan program kerja tersebut?
9. Bagaimana pelaksanaan APBDesa Desa Pekalongan seperti apa?
10. Apakah program kerja yang sudah ditetapkan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat? Bentuk sosialisasinya seperti apa?
11. Bagaimana penyampaian kebijakan tentang pelaksanaan program kerja pada masyarakat?
12. Apakah desa selalu membuat laporan pelaksanaan APBDes? Bentuknya seperti apa?
13. Bagaimana desa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan program kerja kepada masyarakat?
14. Kendala apa yang dihadapi desa dalam menyusun program kerja?
15. Kendala apa yang dihadapi desa dalam mengelola anggaran desa?
16. Kendala apa yang dihadapi desa dalam membuat laporan pertanggung jawaban?

LAMPIRAN 1.2

Lampiran Pedoman Wawancara kepada Bendahara Desa Pekalongan

2. Nama : -
Agama : -
Jenis Kelamin : -
Jabatan : -

1. Dalam melakukan penyusunan anggaran Desa Pekalongan apakah ada aturan atau undang-undang yang disetujui atau diterapkan?
2. Bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekalongan?
3. Siapa saja yang berperan dalam penyusunan APBDesa Pekalongan?
4. Keterlibatan masyarakat dalam menyusun APBDesa itu apa?
5. Program kerja yang bagaimana yang disetujui atau diprioritaskan?
6. Program kerja itu sumbernya darimana?
7. siapa yang menetapkan program kerja tersebut?
8. Bagaimana pelaksanaan APBDesa Desa Pekalongan seperti apa?
9. Apakah program kerja yang sudah ditetapkan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat? Bentuk sosialisasinya seperti apa?
10. Bagaimana penyampaian kebijakan tentang pelaksanaan program kerja pada masyarakat?
11. Apakah desa selalu membuat laporan pelaksanaan APBDes? Bentuknya seperti apa?
12. Bagaimana desa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan program kerja kepada masyarakat?
13. Kendala apa yang dihadapi desa dalam menyusun program kerja?
14. Kendala apa yang dihadapi desa dalam mengelola anggaran desa?
15. Kendala apa yang dihadapi desa dalam membuat laporan pertanggung jawaban?

LAMPIRAN 1.3

Lampiran Pedoman Wawancara kepada Sekretaris Desa Pekalongan

3. Nama : -
Agama : -
Jenis Kelamin : -
Jabatan : -

1. Dalam melakukan penyusunan anggaran Desa Pekalongan apakah ada aturan atau undang-undang yang disetujui atau diterapkan?
2. Bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekalongan?
3. Siapa saja yang berperan dalam penyusunan APBDesa Pekalongan?
4. Keterlibatan masyarakat dalam menyusun APBDesa itu apa?
5. Program kerja itu sumbernya darimana?
6. Program kerja yang bagaimana yang disetujui atau diprioritaskan?
7. siapa yang menetapkan program kerja tersebut?
8. Bagaimana pelaksanaan APBDesa Desa Pekalongan seperti apa?
9. Apakah program kerja yang sudah ditetapkan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat? Bentuk sosialisasinya seperti apa?
10. Bagaimana penyampaian kebijakan tentang pelaksanaan program kerja pada masyarakat?
11. Apakah desa selalu membuat laporan pelaksanaan APBDes? Bentuknya seperti apa?
12. Bagaimana desa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan program kerja kepada masyarakat?
13. Kendala apa yang dihadapi desa dalam menyusun program kerja?
14. Kendala apa yang dihadapi desa dalam mengelola anggaran desa?
15. Kendala apa yang dihadapi desa dalam membuat laporan pertanggung jawaban?

LAMPIRAN 1.4

Lampiran Pedoman Wawancara kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pekalongan:

4. Nama : -
Agama : -
Jenis Kelamin : -
Jabatan : -

1. Apakah BPD mempunyai pengaruh dalam penyusunan APBDes Pekalongan?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menyusun APBDes?
3. Apakah BPD mengetahui sumber dari program kerja Desa Pekalongan?
4. Apakah BPD di ikut sertakan dalam menyetujui program kerja Desa Pekalongan?
5. Setelah program kerja selesai , apakah BPD mengetahui siapa yang menetapkan program kerja tersebut?
6. Bagaimana pelaksanaan APBDesa Desa Pekalongan seperti apa?
7. Apakah program kerja yang sudah ditetapkan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat? Bentuk sosialisasinya seperti apa?
8. Apakah BPD tau tentang bagaimana penyampaian kebijakan tentang program kerja pada masyarakat?
9. Apakah BPD memperoleh laporan pelaksanaan APBDes?
10. Bagaimana desa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan program kerja kepada masyarakat?
11. Bagaimana desa memperlihatkan bentuk transparansi APBD kepada masyarakat?

LAMPIRAN 1.5

Lampiran Pedoman Wawancara kepada Ketua RT (sebagai perwakilan masyarakat) Desa Pekalongan:

- 5. Nama : -
- Agama : -
- Jenis Kelamin : -
- Jabatan : -

1. Apakah Bapak mengetahui UU atau aturan yang digunakan desa dalam menyusun anggaran desa?
2. Apakah bapak dilibatkan atau mempunyai peran dalam proses perencanaan APBD?
3. Apakah bapak dilibatkan atau mempunyai peran dalam proses penyusunan APBD?
4. Apakah bapak memperoleh laporan pertanggung jawaban dari program kerja dari desa?
5. Bagaimana pelaksanaan program kerja dari pemerintahan desa? Bentuk sosialisasinya seperti apa?
6. Bagaimana penyampaian kebijakan tentang pelaksanaan program kerja pada masyarakat?
7. Apakah masyarakat diperlihatkan bentuk dari laporan pelaksanaan APBD?
8. Bagaimana desa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan program kerja kepada masyarakat

LAMPIRAN 2.1

HASIL WAWANCARA MENDALAM DENGAN PARA INFORMAN UTAMA

No	Pertanyaan	IU 1	IU 2	IU 3	Kesimpulan
1	Dalam penyusunan anggaran Desa Pekalongan apakah ada aturan atau undang-undang yang disetujui atau diterapkan?	Ya ada mba, dari UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, PP NO 60 tahun 2014, Permendagri No 113 tahun 2014	UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, pp no 60 tahun 2014, permendagri 113tahun2014, dan masih ada beberapa aturan yang mengatur tentang dana desa yang bersumber dari APBDDesa.	Tentu saja ada mba, salah satunya ada UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, pp no 60 tahun 2014, permendagri 113tahun2014. Yang menjadikan acuan kita dalam membuat APBDES.	Pada tahap penyusunan anggaran pemerintah desa pekalongan sudah menggunakan aturan yang berlaku yaitu UU NO 6 tahun 2014 , permendagri 113 tahun 2014
2	Bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekalongan?	Diadakanya rapat MUSRENGBANGDES bersdama BPD dan perwakilan rakyat mba,	Melaksanakan MUSRENGBANGDES, dalam musrengbangdes akan ditentukan prioritas pembangunan. Desa tidak menentukan apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, namun semua itu ditentukan dari musrengbangdes.apabila ada titik yang kurang di memumpuni untuk di perbaiki maka akan diajukan	Di mulai dengan rapat MUSRENGBANGDES mba	Pada proses penyusunan anggaran desa pekalongan, pihak desa melaksanakan rapat yang di namakan MUSRENGBANGDES

			di musrengbangcam	Semua kalangan desa di ikut sertakan mba mba , seperti pak petinggi, pak BPD, bu bendes, serta saya selaku sekdes, kemudian ada kasi perencanaan, kamituo, semua ketua RT dan RW, selaku wakil masyarakat per RT.	Penyusunan anggaran, desa pekalongan sudah melibatkan berbagai komponen masyarakat.
3	Siapa saja yang berperan dalam penyusunan APBDesa Pekalongan?	Salah satunya ya ada bendahara, ada kasi perencanaan, ada pak carik, pokoknya semuanya	Semua tokoh mba, seperti sekdes, bendes, seksi perencanaan , RT,RW,BPD, kades	Semua kalangan desa di ikut sertakan mba mba , seperti pak petinggi, pak BPD, bu bendes, serta saya selaku sekdes, kemudian ada kasi perencanaan, kamituo, semua ketua RT dan RW, selaku wakil masyarakat per RT.	Penyusunan anggaran, desa pekalongan sudah melibatkan berbagai komponen masyarakat.
4	Keterlibatan masyarakat dalam menyusun APBDesa itu apa?	Masyarakat memiliki wewenang untuk mengusulkan program desa, seperti perbaikan jalan, perbaikan air(gorong-gorong), masyarakat disini di wakili oleh ketua RT dan RW, dan tokoh, agama, tokoh pemuda, tokoh lembaga-lembaga yang lain yang ada di desa pekalongan dan masyarakat yang lainnya juga	Tentu saja masyarakat terlibat mba, kan semua program-program ini toh kembali untuk masyarakat, jadi masyarakat berhak mengusulkan apa saja di MUSRENGBANGDES melalui perwakilan RT atau ke BPD juga bisa	Menurut saya keterlibatan masyarakat ini sangat lah penting mba,, sebab program kerja ini di susun kan ya kembali ke masyarakat, toh usulan mereka ini lah yang menjadi program kerja desa. Jadi peran masyarakat ini sangatlah penting dalam penyusunan ABPDES Pekalongan	Masyarakat sudah ikut serta dalam menyusun APBDES
5	Program kerja itu sumbernya darimana?	Setiap petinggi baru membuat RPJMDES, di dalam RPJMDES terdapat tim yang biasa di sebut tim	Dari susunan program RPJMDES mba	Program kerja itu program yang di susun dan disetujui bersama mba, namanya RPJMDES sumbernya ya dari kondisi desa	Program kerja desa bersumber pada RPJMDES

		sebelas, yang bertugas merancang RPJMDES nah tim ini bertugas mengumpulkan aspirasi masyarakat serta menyusunya, yang dimana berisikan program kerja jangka panjang selama 6 tahun, jadi program yang di susun selama 6 tahun itu di laksanakan sesuai prioritas,		pekalongan mba. Dimana semua aspirasi masyarakat akan di tamping kemustian di pilah dan di tentukan yang jadi prioritas. Maka itulah yang menjadi program kerjanya.	
6	Program kerja yang bagaimana yang disetujui atau diprioritaskan?	Program kerja yang sudah di setuju dalam rapat yang menjadi prioritas utama.	Yang sudah di tetapkan dan yang sudah di setuju oleh BPD,dan kades mba	Yang sudah dipilih dan yang menjadi prioritas dalam RPJMDES	Program kerja yang menjadi prioritas yakni program kerja yang di setuju oleh aparat desa beserta jajaranya
7	siapa yang menetapkan program kerja tersebut?	Setelah selesai membuat RPJMDES , maka akan di bentuk tim sebelas, selaku pembuat program kerja dimana ada banyak tokoh seperti, bendahara, sekretaris, kades, kasi perencanaan, dll.	Yang menetapkan ada lah kades beserta aparat desa dan di setuju oleh BPD.	Kita biasa sebut dengan tim sebelas mba	Program kerja ditetapkan oleh kepala desa dan di setuju oleh BPD
8	Bagaimana pelaksanaan APBDesa Pekalongan seperti	Awal mula pelaksanaan APBDesa itu diawali dengan rapat dengan MUSRENGBANGDES	Melaksanakan rapat MUSRENGBANGDES mba, disana semua aspirasi	Pertama ya melakukan rapat mba MUSRENGBANGDES namanya	Pelaksanaan APBDES desa pekalongan sudah baik, mereka mengumpulkan

	apa?	mba	masyarakat akan di terima,		aspirasi dari rapat desa
9	Apakah program kerja yang sudah ditetapkan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat? Bentuk sosialisasinya seperti apa?	Bentuk sosialisasinya ya dengan adanya rapat itu, lalu adanya banner seperti yang ada di depan baledesa itu mbak. Namanya info grafis	Iya lah mbak, di sosialisasikan kalo endak begitu mana masyarakat bias tau,, sosialisasinya melalui rapat, dimana masyarakat di wakili para ketua RT, lalu melalui sosmed, serta banner mba	Tentu saja mba, bentuknya bias di lihat di depan itu ada banner, kemudian mba bias bukan akun social media desa pekalongan, di sana ada beberapa benuk sosialisasinya.	Sosialisasi program kerja desa sudah di laksanakan dari mulai rapat, posting ke sosmed, serta pemasangan banner di tempat setrategis
10	Bagaimana penyampaian kebijakan tentang pelaksanaan program kerja pada masyarakat?	Penyampainya dengan adanya sosialisasi mbak, dengan ,melibatkan tokoh masyarakat seperti RT sebagai perwakilan masyarakat pekalongan.	Dengan rapat mba yang melibatkan tokoh masyarakat seperti RT sebagai perwakilan masyarakat desa pekalongan	Diadakanya rapat mba, dimana sebagai perwakilan masyarakat seperti RT, nah melalui ketua RT ini akan di sampaikan ke kembali pada masyarakat melalui forum kumpulan pengajian, arisan dan lain’.	penyampaian kebijakan tentang pelaksanaan program kerja pada masyarakat sudah dilaksanakan dengan cara rapat yang melibatkan
11	Apakah desa selalu membuat laporan pelaksanaan APBDes? Bentuknya seperti apa?	Iya iyalah..kalo tidak terus gimana mau di samperin oleh KPK,,,,... Bentuknya macam-macam, secara online langsung ke pusat iya, secara tertulis	Iyaa mba tentu saja, kalo untuk masyarakat kita buat dalam bentuk banner, yang di letakan di tempat setrategis di desa pekalongan seperti yang ada di depan balai desa itu mba, kalo untuk ke pihak yang lebih tinggi kita buat dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan	Tentu saja mba, jika desa tidak membuat laporan ya pasti aka ada malasah besar, bias-bisa nanti akan di datangi KPK, bentuknya kita mambual laporan realisasi anggaran mba.	Pada desa pekalongan selalu melaksanakan laporan ke pihak otoritas yang lebih tinggi, dengan bentuk tertulis ataupun soft file.

	<p>12</p> <p>Bagaimana desa bertanggung jawabkan seluruh kegiatan program kerja kepada masyarakat?</p>	<p>Itu pun tanpa kita melakukan pertanggung jawaban, kegiatan itu juga sudah ada pendampingnya, juga ada monitoringnya, jadi semua kegiatan langsung di monitoring dari pihak independen(dari kecamatan, dari kepolisian) mereka terus mendampingi. Jadi tidak ada bahasa sembunyi-sembunyi itu endak bias.</p>	<p>APBDES.</p> <p>Dengan bukti dong mba, bukti telah dilaksanakanya perbaikan jalan yang rusak,, mba boleh liat di RT 5 RW I</p>	<p>Mengenai pertanggung jawaban kita dapat melihat bukti nya langsung mba, itu mungkin sudah menjadi jawaban atas pertanyaan mba ana, tentang pertanggung jawaban program desa.</p>	<p>Pihak desa sudah mempertanggung jawabkan programnya dengan bukti berupa hasil nyata.</p>
<p>13</p> <p>Kendala apa yang dihadapi dalam menyusun program kerja?</p>	<p>Kalo kendala itu tidak ada,, karena apa?, sebab sudah ada pendamping desa mereka malah memiliki SK bupati, jadi endak main-main dalam mengawasinya, jadi kita mau membuat aturan sendiri itu endak bias, semua sudah ada aturan tinggal kita menganut aturan itu saja kalau mau aman sejahtera</p>	<p>sebelumnya ,, belum di temukan kendala atau bias di bilang kecil kemungkinannya mba.</p>	<p>Kecil kemungkinannya mba kalo terjadi kedala sebab semua langkah kita di awasi oleh pihak pemerintah.</p>	<p>Pada desa pekalongan belum menemukan kendala dalam proses APBDES.</p>	

LAMPIRAN 2.2

HASIL WAWANCARA MENDALAM DENGAN BPD SELAKU IT 1

NO	PERTANYAAN	JAWAB	KESIMPULAN
1.	Apakah BPD mempunyai pengaruh dalam penyusunan APBDes Pekalongan?	Iya, BPD mempunyai peran dalam penyusunan APBDes Pekalongan.	BPD sangat berpengaruh dalam proses penyusunan
2	Bagaimana keterlibatan BPD dalam menyusun APBDes?	Iya, untuk masalah aturan dan sebagainya BPD tetap dilibatkan. Tapi kadang kita itu hanya menerima hasil yang sudah mereka susun, lalu kita pelajari dan kita setuju, sebenarnya aslinya kita harusnya kan mengikuti dari awal.	BPD sudah ikut terlibat dalam proses penyusunan
3	Apakah BPD mengetahui sumber dari program kerja Desa Pekalongan?	Iya tau, tapi kalo suruh menghafalkan isi undang-undang ya saya kurang sanggup, namun jika kita membuat program kita tetap berpedoman ke UU NO 6 tahun 2014 tentang desa, PP NO 60 tahun 2014, Permendagri No 113 tahun 2014 lalu Peraturan Bupati Jepara No 4 Tahun 2018, Peraturan Desa Pekalongan No 6 tahun 2019 tentang APBDES, Peraturan Desa Pekalongan No 4 tahun 2020 tentang APBDES.	BPD mengetahui aturan yang di gunakan dalam proses APBDES
4	Apakah BPD di ikut sertakan dalam menyetujui program kerja Desa Pekalongan?	Iya, kita ikut berperan dalam melaksanakan program kerja desa.	BPD selalu ikut serta dalam semua proses program desa
5	Setelah program kerja selesai , apakah BPD mengetahui siapa yang menetapkan	Iya tentu saja mengetahui	BPD mengetahui siapa saja yang menetapkan program kerja

	program kerja tersebut?		
6	Bagaimana pelaksanaan APBDesa Desa Pekalongan seperti apa?	Dimulai dari mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa, seperti rehap jalan di beberapa titik desa, lalu akan di usulkan saat MUSRENGBANGES, usulan usulan itu tidak semata-mata semua di terima, akan adanya penyarangan pembangunan untuk di jadikan prioritas pembangunan desa.	BPD memahami betul tentang pelaksanaan APBDES
7	Apakah program kerja yang sudah ditetapkan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat? Bentuk sosialisasinya seperti apa?	Iya disosialisasikan dalam bentuk banner, yang letakan di tempat strategis di desa. Harapan kami selaku BPD program kerja desa itu juga harus di unggah ke medsos agar banyak kalangan yang tau, toh pada kenyataanya saat ini sudah sangat moderen, hampir semua kalangan menggunakan social media.	BPD mengetahui bahwa program kerja itu di sosialisasikan
8	Apakah BPD tau tentang bagaimana penyampaian kebijakan tentang program kerja pada masyarakat?	Tentu saya tau	BPD mengetahui tentang bagaimana penyampain program kerja kepada masyarakat
9	Apakah BPD memperoleh laporan pelaksanaan APBDes?	Iya, saat ini BPD hanya menerima laporan untuk di setujui, jika dalam laporan ada sesuatu yang janggal, BPD berhak tidak tanda tangan sehingga tidak akan adanya laporan, toh poada kenyataanya kalau tidak ada tandatangan BPD laporan tidak akan diterima oleh pihak kecamatan dan kabupaten.	BPD mendapatkan laporan
10	Bagaimana desa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan program kerja kepada masyarakat?	Dengan mengalokasikan dana anggaran yang sudah di siapkan untuk melakukan semua program-program desa. Untuk menjadikan desa pekalongan semakin maju dan lebih baik.	BPD mengetahui bagaimana desa melaksanakan akuntabilitas kepada masyarakat

11	Bagaimana desa memperlihatkan bentuk transparansi APBD kepada masyarakat?	Salah satunya dalam bentuk, banner yang di taruh di beberapa titik di desa pekalongan, selain itu di sosmed desa pekalongan salah satunya di instagram desa pekalongan yakni pemdes_pekalongan, mbak nya bias liat di sana.	BPD mengetahui bagaimana proses pemerintahan desa melaksanakan prinsip transparansi kepada masyarakat.
----	---	---	--

LAMPIRAN 2.3

HASIL WAWANCARA MENDALAM DENGAN KETUA RT SELAKU IB 1

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KESIMPULAN
1	Apakah Bapak mengetahui UU atau aturan yang digunakan desa dalam menyusun anggaran desa?	Saya Tidak tau aturan yang di gunakan, saya tidak pernah di kasih lampiran, aturan-aturanitu, hanya saja kalo ada rapat MUSRENGBANGES saya di beri selebaran. Untuk dating ke balaidesa.	Banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang aturan dalam proses APBDES
2	Apakah bapak dilibatkan atau mempunyai peran dalam proses penyusunan APBD?	Engak di libatkan, hanya di ajak rapat sekedar menyampaikan informasi tetang rencana APBD	Masyarakat sekedar diajak rapat
3	Apakah bapak memperoleh laporan pertanggung jawaban dari program kerja dari desa?	Tidak, saya tidak memperoleh lapiran pertanggung jawaban dari program kerja desa.	Masyarakat tidak mendapat lampiran laporan dari program kerja
4	Bagaimana pelaksanaan program kerja dari pemerintahan desa? Bentuk sosialisasinya seperti apa?	Menurut saya baik, sebab ada pembahasan serta perencanaan yang melibatkan pihak RT, seperti akan adanya perbaikan jalan itu pasti ada musyawarah dengan mengumpulkan para RT da RW desa	Sudah baik, sebab sudah melibatkan masyarakat
5	Bagaimana penyampaian kebijakan tentang pelaksanaan program kerja pada masyarakat?	Mereka menyampaikannya melalui penyuluhan, melalui rapat yang bersifat resmi mereka memilih perwakilan masyarakat seperti ketua RT dan ketua	Penyampaian kebijakan program desa sudah baik, dilihat dari penyuluhan

		RW	
6	Apakah masyarakat diperlihatkan bentuk dari laporan pelaksanaan APBD?	Iya, mereka memperlihatkan dalam bentuk banner, yang di letakan di tempat setrategi di desa.	Pihak desa sudah melihat banner
7	Bagaimana desa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan program kerja kepada masyarakat	Setahu saya, pertanggung jawabanya itu di laporkan ke BPD, biasanya jika ada laporan pembangunan atau apapun itu yang berhubungan dengan dana, akan di sampaikan ke BPD selaku wakil dari masyarakat.	Pihak desa sudah melaporkan ke otoritas yang lebih tinggi.

LAMPIRAN 3

Adapun Bukti Wawancara Dengan Informan

1. Adapun Bukti Foto Dengan Kepala Desa Dan Bendahara Desa



2. Adapun Bukti Foto Wawancara Dengan Kepala BPD



3. Adapun Bukti Foto Wawancara Dengan Ketua RT



4. Bukti bahwa Desa pekalongan telah melaksanakan transparansi dan

Akuntabilitas

1. Adapun bukti bahwa desa pekalongan sudah melaksanakan transparansi di buktikan dengan foto berikut ini





2. Adapun bukti bahwa Desa pekalongan sudah melaksanakan proses akuntabilitas dapat di buktikan dengan foto berikut ini.

